



Munich Personal RePEc Archive

**LOCAL FINANCIAL PERFORMANCE
AND THE SOCIAL WELFARE ON
DISTRICTS AND MUNICIPALS OF
SOUTH SULAWESI ON 2008-2012 :
PANEL REGRESSION WITH
RANDOM EFFECT MODEL (REM)**

Iskandar, Azwar and Subekan, Achmat

Balai Diklat Keuangan Makassar, Kementerian Keuangan, Balai
Diklat Keuangan Makassar, Kementerian Keuangan

2014

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77677/>

MPRA Paper No. 77677, posted 20 Mar 2017 22:42 UTC

KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
DI ERA DESENTRALISASI FISKAL
(STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN TA 2008-2012)

(LOCAL FINANCIAL PERFORMANCE AND THE SOCIAL WELFARE ON DISTRICTS AND MUNICIPALS OF SOUTH
SULAWESI ON 2008-2012 : PANEL REGRESSION WITH RANDOM EFFECT MODEL (REM))

Azwar
Achmat Subekan
Balai Diklat Keuangan Makassar

Abstrak/ Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat rasio kinerja keuangan daerah dan pengaruhnya yang diwakili oleh rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah, terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur melalui nilai rasio Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) pada tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan Teknik Regresi Data Panel dengan pendekatan *Random Effect Model (REM)*. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada pola tata hubungan instruktif, di mana pada pola ini pengarahan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat daripada kemandirian pemerintah daerah; tingkat efektifitas keuangan daerah berada pada posisi yang sangat efektif; dan tingkat efisiensi keuangan daerah berada posisi yang kurang efisien. Sementara itu, kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dengan arah hubungan positif; efektifitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dengan arah hubungan positif; dan efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dengan arah hubungan negatif.

This research is aimed to examine the effect of local financial performance to the social welfare on districts and municipals of South Sulawesi on 2008-2012. Local financial performance as independent variable is represented by autonomy rate, efectiveness and efficiency of local financial performance. Social welfare as dependent variable is represented by Human Development Index (HDI). Based on the aim, this research use Panel Regression with Random Effect Model (REM) as analytical tool. The empirical results show that local financial performance simultaneously has a positive significant effect on social welfare. The local autonomy rate partially has a positive significant effect on social welfare. Meanwhile, effectiveness of local financial performance has a positive effect but not significant on social welfare, and efficiency of local financial performance partially has a negative effect but not significant on social welfare.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting. Berbagai macam teori dan kebijakan ekonomi diterapkan dalam rangka mencapai dan mengusahakan tujuan bersama yang diterjemahkan sebagai kesejahteraan hidup. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum” sebagai salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara ekonomi, kesejahteraan hidup suatu negara biasa diukur melalui berbagai

instrumen seperti pertumbuhan ekonomi (*growth*), pendapatan per kapita (*per capita income*) dan Indeks Pembangunan Manusia (*human development index*).

Dalam kajian *spending review* terkini terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu unsur ekonomi dan keuangan negara, prosesnya tidak terlepas dari tema desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah) menggantikan model sentralisasi yang telah dijalankan puluhan tahun sebelumnya. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Secara konseptual, desentralisasi fiskal adalah

Tabel 1
Data Realisasi PAD dan Dana Perimbangan (DP)
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2008-2012
(dalam jutaan rupiah)

Kab/Kota	2008		2009		2010		2011		2012	
	PAD	DP	PAD	DP	PAD	DP	PAD	DP	PAD	DP
Kab. Bantaeng	12.686	299.123	12.178	298.633	11.085	313.528	19.468	351.501	21.991	392.630
Kab. Barru	13.316	318.104	12.604	328.247	12.918	324.653	16.833	365.694	29.598	428.159
Kab. Bone	50.669	640.050	39.201	655.569	34.842	663.026	34.415	761.562	52.348	913.646
Kab. Bulukumba	20.306	452.169	21.418	471.417	16.991	467.675	22.239	526.847	25.173	605.029
Kab. Enrekang	24.113	328.859	23.787	339.738	14.650	330.936	13.466	376.762	17.921	459.138
Kab. Jeneponto	8.852	378.646	9.960	376.439	13.317	392.108	12.109	443.071	14.894	528.943
Kab. Luwu	17.604	407.595	19.337	422.559	17.931	446.226	18.318	480.930	29.322	556.600
Kab. Luwu Utara	16.987	393.714	20.966	407.846	27.665	421.924	34.613	471.662	37.855	537.613
Kab. Pinrang	23.016	437.927	26.722	421.922	21.009	446.104	26.639	503.085	29.605	578.560
Kab. Selayar	15.419	323.080	13.380	332.457	10.759	320.939	15.403	375.599	17.230	436.943
Kab. Soppeng	17.460	392.132	16.104	401.071	16.531	397.523	21.552	448.094	25.895	513.337
Kab. Takalar	13.213	373.861	13.982	370.473	12.394	374.857	14.830	402.024	32.936	482.168
Kab. Tana Toraja	21.540	486.016	17.764	344.452	20.284	370.357	19.645	409.073	31.721	477.283
Kota Palopo	20.928	288.847	21.550	310.076	28.219	323.692	35.703	347.879	36.214	421.382
Jumlah	276.109	5.520.123	268.953	5.480.899	258.595	5.593.548	305.233	6.263.783	402.703	7.331.431

Sumber : BPS,DJPK, diolah

pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi (Halim, 2007).

Dalam perspektif teori, desentralisasi akan mendekatkan pemerintah kepada konstituennya (masyarakat), sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik diharapkan tercipta efisiensi dan efektifitas dalam perekonomian. Pembangunan daerah sebagai bentuk impementasi konsep pemerataan dan keadilan sosial dalam pemerintahan desentralistik, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat di daerah tersebut (*bottom up*), dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia.

Di antara tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat serta diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Salah satu aspek penting pelaksanaan kewenangan otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan potensi penerimaan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan (DP)

dari pemerintah pusat. Komposisi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 1 di atas. Dari tabel 1 tersebut terlihat bahwa sumber pendapatan keuangan daerah masih didominasi

Tabel 2
Data Target Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008-2012
(dalam jutaan rupiah)

Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Bantaeng	318.269	364.181	371.536	379.670	446.489
Kab. Barru	340.637	472.165	414.893	481.975	509.469
Kab. Bone	730.922	849.268	831.201	869.291	1.130.019
Kab. Bulukumba	516.727	545.931	597.733	694.009	722.923
Kab. Enrekang	412.589	435.231	423.609	503.154	560.449
Kab. Jeneponto	416.161.	460.235	443.580	533.862	566.761
Kab. Luwu	431.606	451.510	449.321	543.851	627.482
Kab. Luwu Utara	420.248	545.349	474.289	555.161	663.933
Kab. Pinrang	454.069	434.240	543.657	638.082	702.765
Kab. Selayar	392.010	529.706	371.221	472.912	516.389
Kab. Soppeng	429.436	440.542	475.336	551.142	601.425
Kab. Takalar	415.261	423.126	425.096	500.510	601.936
Kab. Tana Toraja	524.930	397.594	429.825	480.614	592.713
Kota Palopo	358.675	374.365	354.222	472.300	496.087

Sumber : BPS,DJPK, diolah

oleh Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Kondisi seperti ini menurut Hersey dan Blanchard dalam Halim (2004) menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode Tahun Anggaran 2008-2012 dinyatakan memiliki kemandirian keuangan yang masih rendah.

Kemandirian keuangan daerah juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Hal ini bertujuan agar keuangan daerah dapat berjalan efektif. Tingkat efektifitas keuangan daerah ini dapat dilihat dari rasio realisasi PAD terhadap target pendapatan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Target pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Selanjutnya, setiap pendapatan yang berhasil diperoleh oleh pemerintah daerah hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat guna, sesuai dengan prinsip efisiensi keuangan. Pada konteks keuangan daerah, hal ini dapat diukur dengan membandingkan besarnya belanja yang dikeluarkan untuk pembangunan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin tinggi persentase perbandingan belanja terhadap pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Data pengeluaran atau belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3
Data Belanja Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2008-2012
(dalam jutaan rupiah)

Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Bantaeng	355.480	375.068	375.759	442.918	468.461
Kab. Barru	455.823	482.102	377.763	517.767	506.968
Kab. Bone	774.248	806.746	750.627	984.658	1.111.240
Kab. Bulukumba	541.745	539.280	596.140	711.001	707.581
Kab. Enrekang	395.175	502.803	433.537	504.363	514.073
Kab. Jeneponto	446.592	398.035	460.228	572.762	551.723
Kab. Luwu	455.458	463.240	512.145	669.748	628.443
Kab. Luwu Utara	447.490	478.512	501.251	626.814	659.333
Kab. Pinrang	506.036	535.204	554.051	678.318	693.380
Kab. Selayar	400.422	419.282	380.806	447.212	477.294
Kab. Soppeng	464.342	489.255	480.231	559.680	617.231

Kab. Takalar	439.719	420.697	427.476	538.995	626.855
Kab. Tana Toraja	562.191	443.303	406.203	561.447	591.091
Kota Palopo	353.884	388.550	383.664	498.403	525.772

Kemandirian, efektifitas dan efisiensi sebagai indikator kinerja keuangan daerah (APBD) menjadi media aktualisasi fungsi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang pro-rakyat dalam bentuk penyediaan *public services* yang dibutuhkan masyarakat, menjalankan fungsi alokatif distributif, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat rasio kinerja keuangan daerah, yang diwakili oleh rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah;
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kinerja keuangan daerah, yang diwakili oleh rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah, terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur melalui nilai rasio Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*).

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Sularso dan Restianto, 2011). Secara sederhana, kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Apabila pencapaian melebihi target, maka kinerja dikatakan sangat baik, sedangkan apabila lebih rendah dari target maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya buruk.

Terkait dengan pentingnya kinerja, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja (Rai, 2008).

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Analisis kinerja

keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan.

Halim (2007) menyatakan bahwa analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Analisis keuangan memerlukan beberapa tolok ukur, di mana tolok ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya (Sawir, 2001).

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, namun pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah, masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan yang bersifat komersil. Di samping itu, penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD (Halim, 2007). Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel adalah di antaranya :

2.1.1 Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Berdasarkan formula di atas, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio PAD terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah

pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) maka semakin baik pula tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dalam konteks desentralisasi, kondisi daerah yang pada hakekatnya memang berbeda-beda, harus diberikan perlakuan (*treatment*) yang juga berbeda oleh pemerintah pusat, dengan maksud untuk memaksimalkan kemampuan daerah dalam mengurus urusan otonomi. Dalam perkembangan desentralisasi saat ini, telah dikembangkan beberapa pola hubungan yang digunakan. Pola-pola hubungan tersebut menunjukkan adanya kaitan antara dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dukungan menunjukkan sampai di mana bantuan dan dorongan yang diberikan untuk mendukung terlaksananya urusan otonomi daerah, sedangkan pengarahan menunjukkan sampai di mana ikut campur, intervensi, atau keterlibatan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Pengarahan pemerintah pusat ini lebih dikaitkan dengan sampai di mana kematangan, kedewasaan atau kemampuan daerah dalam melaksanakan urusan otonominya.

Memberikan dukungan berarti mendorong daerah untuk meningkatkan kemampuannya pada tingkatan yang lebih tinggi, sehingga perbedaan di antara tata hubungan tersebut sebenarnya bersifat gradatif antara pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan kematangan dan kemandirian yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun bentuk-bentuk pola hubungan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. pola tata hubungan instruktif; pada pola ini, pengarahan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat daripada kemandirian pemerintah daerah.
- b. pola tata hubungan konsultatif; pada pola ini, pengarahan (campur tangan) dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat.
- c. pola tata hubungan partisipatif; dengan pola ini pengarahan dari pemerintah pusat lebih banyak lagi dikurangi mengingat kemampuan pemerintah daerah yang sudah tinggi.
- d. pola tata hubungan delegatif; pada pola tingkatan ini pemerintah pusat telah jauh mengurangi atau bahkan telah meniadakan campur tangannya dalam mengurus otonomi daerah.

Adapun kriteria untuk menetapkan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 4 berikut :

Tabel 4
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
0,00 – 25,00	Instruktif
25,01 – 50,00	Konsultif
50,01 – 75,00	Partisipatif
75,01 – 100,00	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2002)

Penerapan kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah.

2.1.2 Efektivitas

Efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Formulasinya adalah sebagai berikut (Halim, 2002) :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan yang Ditetapkan}}$$

Kriteria untuk menetapkan tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 5 berikut :

Tabel 5
Kriteria Penilaian Efektifitas Keuangan Daerah

Persentase Pendapatan Terhadap Target Pendapatan	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
90,00 – 100	Efektif
80,00 – 90,00	Cukup Efektif
60,00 – 80,00	Kurang Efektif
Kurang dari 60	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2.1.3 Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Formulasinya adalah sebagai berikut (DJPK, 2011) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realiasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Kriteria untuk menetapkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 6 berikut :

Tabel 6
Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Pengeluaran Terhadap Penerimaan	Kriteria
Di atas 100	Tidak Efisien
90,00 – 100	Kurang Efisien
80,00 – 90,00	Cukup Efisien
60,00 – 80,00	Efisien
Kurang dari 60	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Menurut Halim (2007) efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Yani, 2009). Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Sehingga suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi.

2.2 Kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) mengartikan kesejahteraan secara lebih luas lebih dari hanya sekedar Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita, yaitu dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia. Budiman (1992) menyatakan bahwa pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Lebih dalam Suradi (2006) menjelaskan makna pembangunan manusia sebagai kondisi dan tingkat kemajuan kehidupan manusia yang diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan sosial.

Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah IPM atau disebut juga dengan *Human Development Index* (HDI).

Rasio IPM ini memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia : (i) panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), (ii) terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi), dan (iii) memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan). IPM dinyatakan dalam skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi). Perlu dicatat bahwa IPM mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut.

Pengukuran IPM yang ditetapkan oleh UNDP sebagai berikut :

1. Indeks harapan hidup (*longevity*), yang diukur dengan formula :

$$Lli = \frac{[Li - LL]}{[HL - LL]} = \frac{Li - 25}{85 - 25}$$

dimana :

- Lli = indeks harapan hidup negara i
- Li = rata-rata usia harapan hidup negara i
- LL = batas usia terendah (25 tahun)
- HL = batas usia tertinggi (85 tahun)

2. Indeks pendidikan (*knowledge*), yang diukur dengan formula :

$$KI_i = \frac{2}{3}li_i + \frac{1}{3}si_i = \frac{2}{3} \left(\frac{[li - 0]}{[100 - 0]} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{[si - 0]}{[100 - 0]} \right)$$

dimana :

- Kli = indeks pendidikan negara i
- lii = indeks baca tulis orang dewasa negara i (>15 tahun)
- sii = indeks masa sekolah bruto negara i
- li = persentase baca tulis negara i
- si = persentase masa sekolah bruto negara i

3. Indeks standar hidup layak (*standard of living*), yang diukur dengan formula :

$$PI_i = \frac{[\log P_i - \log(100)]}{[\log(40.000) - \log(100)]}$$

dimana :

- PIi = indeks paritas daya beli negara i
- Pi = paritas daya beli negara negara i

Secara total, Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), dapat diukur dengan formula :

$$HDI_i = \frac{1}{3}LI_i + \frac{1}{3}KI_i + \frac{1}{3}PI_i$$

dimana :

HDI = indeks pembangunan manusia negara i

IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996). IPM mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah (UNDP, 2004). Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal (Simanjuntak, 2000). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa "pembayaran transfer", dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya (Todaro, 2000).

2.3. Desentralisasi Fiskal

Secara umum, desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke level pemerintahan yang ada di bawahnya. Secara teoritis ada beberapa tipe desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal (Osoro, 2003 dalam Khusaini, 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 7, desentralisasi adalah

penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi fiskal dapat dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat (Khusaini, 2006). Pengertian ini mengisyaratkan bahwa desentralisasi memberikan ruang gerak yang lebih bagi pemerintah daerah untuk berimprovisasi dalam hal pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah, seperti pelaksanaan tugas-tugas rutin, pelayanan publik, dan peningkatan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya.

Secara teori, desentralisasi akan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik akan tercipta efisiensi dalam perekonomian, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tujuan dari desentralisasi fiskal di Indonesia adalah :

1. Kestinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dalam konteks ekonomi makro;
2. Mengoreksi *vertical imbalance*, yaitu mereduksi ketimpangan antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dengan memperbesar *taxing power* daerah;
3. Mengoreksi *horizontal imbalance*, yaitu memperkecil disparitas antar daerah dengan mekanisme *block grant*/transfer dan memperbesar kewenangan daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki;
4. Mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat;
5. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja daerah;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Memperbesar partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai referensi dalam

melakukan penelitian ini. Meskipun demikian, diakui bahwa penelitian-penelitian terdahulu yang berkenaan langsung dengan topik penelitian ini yang membahas pengaruh atau hubungan antara kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, masih jarang didapatkan.

Dewa (2010) melakukan penelitian berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum ditemukan evaluasi kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang. desentralisasi fiskal cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

Decta (2013) melakukan analisis pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. PAD dan Dana Perimbangan sebagai variabel utama dirasiokan dengan belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel kontrol berdasar kajian teori dari *Human Development Report* UNDP tahun 1996. Analisis penelitian menggunakan analisis data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu rasio DBH terhadap belanja modal menjadi satu-satunya variabel yang tidak signifikan mempengaruhi IPM. Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM.

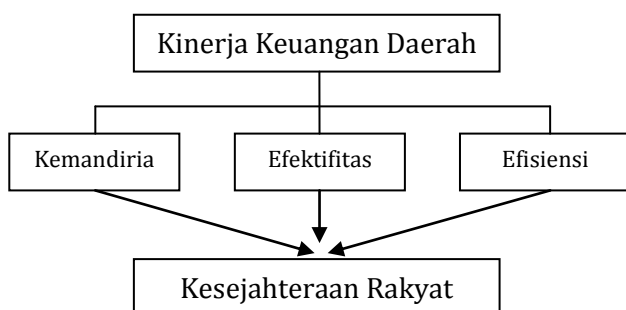
Sri (2009) meneliti kebijaksanaan APBD dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel, ditemukan bahwa kapasitas fiskal dan alokasi belanja modal berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan pembiayaan daerah berhubungan negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Indah dkk. (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Pangkep secara simultan dan parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep.

Kusreni dan Suhab (2009) dalam "Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan", melakukan penelitian terhadap 22 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasar data panel selama kurun waktu 2003-2007. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan *random effect*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas fiskal, alokasi belanja modal dan pembiayaan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel yang digunakan meliputi variabel PAD dan DBH (kapasitas fiskal), belanja modal daerah dan pembiayaan daerah terhadap variabel dependen IPM (kesejahteraan masyarakat). Dari estimasi variabel-variabel diatas diperoleh beberapa hasil yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain (i) kapasitas fiskal (PAD dan DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan (IPM), (ii) kapasitas fiskal berpengaruh lebih besar daripada alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, hipotesis penelitian yang akan dibuktikan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal, melalui indikator kinerja keuangan daerah berupa kemandirian, efektifitas dan efisiensi yang baik. Oleh karena itu, hipotesis penelitian terkait hal ini dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Kinerja keuangan daerah yang diwakili oleh kemandirian, efektifitas dan efisiensi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur dengan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara terpisah, kemandirian dan efektifitas keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hipotesis penelitian terkait hal ini dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur dengan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

H₃ : Efektifitas keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur dengan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pengeluaran maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah. Artinya rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis penelitian terkait hal ini dirumuskan sebagai berikut :

H₄ : Efisiensi keuangan daerah

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang diukur dengan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data, Sampel, dan Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dilihat dari cara memperolehnya, data yang digunakan digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh dari pihak lain. Data diperoleh dari publikasi data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, periode tahun 2008-2012. Data-data tersebut ditabulasikan ke dalam struktur *time series-cross section* (data panel).

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Metode sampel yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling*. Dari seluruh populasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang terdiri dari 23 kabupaten/kota, hanya 14 kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dalam model penelitian. Terdapat 9 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat karena data komponen APBD untuk tahun 2008-2012 tidak lengkap.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable kinerja keuangan daerah yang mencakup beberapa parameter sebagai *proxy* berupa rasio kemandirian (MND), rasio efektifitas (EFT), dan rasio efisiensi (EFS) sebagai variabel independen dan variabel kesejahteraan rakyat yang diukur (*proxy*) dari rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen.

Tabel 7
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengukuran	Simbol	Skala
1	Kemandirian	Rasio PAD/Dana Perimbangan	MND	Rasio
2	Efektifitas	Rasio Pendapatan/Target Pendapatan	EFT	Rasio
3	Efisiensi	Rasio Pengeluaran/Penerimaan	EFS	Rasio
4	Kesejahteraan rakyat	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Rasio

3.2 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Analisis data panel adalah suatu metode regresi terhadap gabungan dari data antar waktu (*timeseries*) dan data antar individu (*cross section*). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalnya pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003).

3.2.2 Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Mengingat teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda, maka terhadap data juga dilakukan uji normalitas dan asumsi klasik untuk memperoleh hasil estimasi regresi yang memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) yakni mempunyai sifat linier, tidak bias, dan varian minimum.

1. Uji Normalitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hal ini dilakukan karena regresi mensyaratkan distribusi error yang normal, artinya nilai error terdistribusi secara simetris di sekitar *mean* (Ghazali, 2005).

Dalam software *eviews* uji normalitas sebuah data dapat diketahui dengan membandingkan nilai *Jarque-Bera* (JB) dan nilai *Chi Square* tabel. Uji *Jarque-Bera* (JB) didapat dari histogram *normality*. Hipotesis yang digunakan dengan alpha 5% adalah :

- H_0 : Data berdistribusi normal
 H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Jika hasil dari *Jarque-Bera* (JB) hitung > *Chi Square* tabel, maka H_0 ditolak. Jika hasil dari *Jarque-Bera* (JB) hitung < *Chi Square* tabel, maka H_0 diterima.

2. Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang

harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Manurung (2005) menjelaskan bahwa ada dua cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, yaitu metode informal dan metode formal. Metode informal biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Variabel dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Metode formal untuk mendeksi keberadaan heteroskedastisitas antara lain dengan *Park Test*, *Glejser Test*, *Spearman's Rank Correlation Test*, *Golfeld-Quandt Test*, *Breusch-Pagan-Godfrey Test*, *White's General Heteroscedasticity Test*, dan *Koenker-Basset Test*.

3. Uji Multikolinearitas.

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu model regresi. Oleh karena itu masalah multikolinearitas tidak terjadi pada regresi linier sederhana yang hanya melibatkan satu variabel independen.

Persamaan regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika tingkat korelasi antarvariabel independen kurang dari 0,95 (Ghazali, 2005).

4. Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series). Uji autokorelasi perlu dilakukan apabila data yang dianalisis merupakan data time series (Gujarati, 2003).

Uji Durbin Watson adalah sebuah test yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual (*prediction errors*) dari sebuah analisis regresi. Pada saat melakukan uji autokorelasi, kita menggunakan tabel Durbin Watson. Tabel tersebut menjadi alat perbandingan terhadap nilai Durbin Watson hitung. Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut :

1. Jika $d < dl$, berarti terdapat autokorelasi positif;

2. Jika $d > (4 - dl)$, berarti terdapat autokorelasi negative;
3. Jika $du < d < (4 - dl)$, berarti tidak terdapat autokorelasi;
4. Jika $dl < d < du$ atau $(4 - du)$, berarti tidak dapat disimpulkan;

di mana : dl adalah batas bawah Durbin Watson dan du adalah batas atas Durbin Watson.

3.2.3 Pengujian Pemilihan Model

Setelah uji asumsi klasik untuk regresi terpenuhi, maka untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu :

1. Model *Common Effect*.

Teknik ini sama pada analisis data *cross section* dan *time series* karena mengasumsikan bahwa koefisien intercept dan slopenya sama (konstan) untuk setiap data *cross section* dan *time series*. dengan kata lain model ini tidak memperhatikan dimensi individu dan waktu. namun, untuk melakukan regresinya perlu menggabungkan data *cross section* dan *time series* yang biasa disebut pool data.

2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*).

Teknik Model Efek Tetap (*Fixed Effect*) sudah memasukkan efek dimensi individu dan waktu. Pada model ini efek dimensi individu dan waktu terletak pada intercept dan slope pada model. sehingga pada model ini menganggap bahwa yang sangat mempengaruhi variabel dependent adalah *slope* dan *intercept*.

3. Model Efek Random (*Random Effect*).

Teknik ketiga ini hampir sama dengan Model fixed effect karena memasukkan efek dimensi individu dan waktu. namun, model ini beranggapan bahwa efek dimensi tersebut terletak pada error dari model.

Sesuai dengan variabel penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan model regresi data panel sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 MND_{it} + \beta_2 EFT_{it} + \beta_3 EFS_{it}$$

dimana :

IPM_{it} = Kesejahteraan Rakyat

MND_{it} = Kemandirian Keuangan Daerah
 EFT_{it} = Efektifitas Keuangan Daerah
 EFS_{it} = Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Winarno (2007), langkah-langkah pengujian pemilihan model data panel secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Estimasi dengan *Fixed Effect*.
2. Uji Chow (untuk menentukan model yang digunakan apakah *Common Effect* atau *Fixed Effect*). Jika H_0 diterima (jika nilai *Prob Cross Section F* dan *Chi Square* > dari 0,05), maka yang dipilih adalah model *Common Effect* (selesai sampai disini). Jika H_0 ditolak (jika nilai *Prob Cross Section F* dan *Chi Square* < dari 0,05), maka yang dipilih adalah model *Fixed Effect*. (teruskan langkah 3).
3. Estimasi dengan *Random Effect*.
4. Uji Hausman (untuk menentukan model yang digunakan apakah *Fixed Effect* atau *Random Effect*). Jika H_0 diterima (jika nilai probabilitas *cross-section random* > dari 0,05), maka dipilih model *Random Effect* (selesai sampai disini). Jika H_0 ditolak (jika nilai probabilitas *cross-section random* < dari 0,05), maka dipilih model *Fixed Effect* (lanjutkan langkah 5).
5. Uji LM, jika terdapat adanya Heterosedastik antar kelompok individu (*crosssection*). H_0 : Homosedastik dan H_1 : Heterosedastik. Jika H_0 diterima, maka model Homosedastik (selesai). Jika H_0 ditolak, maka model Heterosedastik. Solusi : dengan *Crosssection Weight* (dan lanjutkan langkah 6).
6. Uji LR, jika terdapat adanya adanya Heterosedastik dan Autokorelasi antar kelompok individu (*crosssection*). Jika H_0 diterima, maka modelnya heteroskedastik. Solusinya dengan *Crosssection Weigth*. Jika H_0 ditolak, maka modelnya SUR. Solusinya dengan *Crosssection SUR*.

3.2.4 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian, dilakukan uji sebagai berikut :

1. Uji Statistik F (Secara Simultan).

Menurut Imam Ghozali (2006) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian dimana H_a diterima apabila $Prob(F\text{-statistic}) < \alpha$ dan H_a ditolak

apabila $Prob(F\text{-statistic}) > \alpha$. Dalam hal ini $\alpha = 0,05$.

2. Uji statistik t (Secara Parsial).

Menurut Imam Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- a. Jika nilai signifikan (*Prob*) > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan (*Prob*) \leq 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

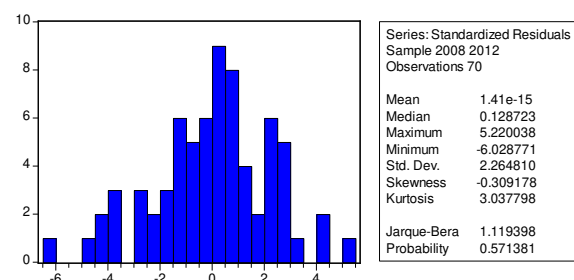
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan pendekatan histogram melalui software *evIEWS* diperoleh hasil sebagai berikut :

Gambar 1
Histogram Hasil Uji Normalitas



Sumber : hasil olah data

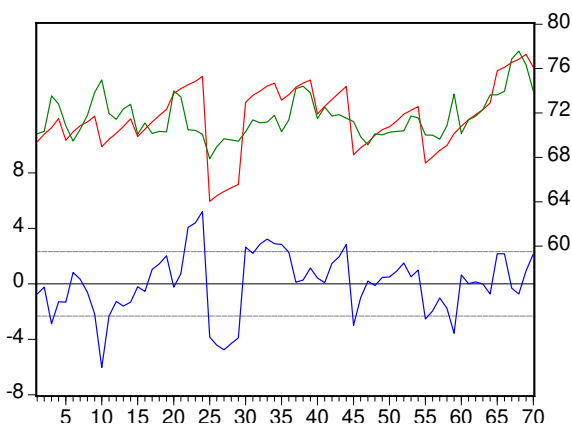
Histogram pada gambar 1 di atas, menunjukkan nilai *Jarque-Bera* (JB) hitung sebesar 1,119398 sementara nilai *Chi Square* dengan melihat jumlah variabel independen yang kita pakai dalam hal ini 3 (tiga) variabel independen ($df=3$) dan nilai signifikan yang kita pakai dalam hal ini 0,05 atau 5%, diperoleh nilai

Chi Square tabel sebesar 7,82. Hal ini berarti bahwa nilai *Jarque-Bera* (JB) hitung lebih kecil dari nilai *Chi Square* ($1,119398 < 7,82$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal (H_0 diterima).

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Hasil uji untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode informal yaitu dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Grafik plot hasil uji dapat dilihat pada gambar 2 berikut :

Gambar 2
Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : hasil olah data

Dari gambar 2 di atas tampak bahwa plot dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3. Hasil Uji Multikolinearitas.

Hasil pengujian korelasi antarvariabel independen pada software *evIEWS* untuk melihat adanya masalah multikolinearitas, diperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas

	MND	EFT	EFS
MND	1	-0.0134	0.1169
EFT	-0.0134	1	-0.44191
EFS	0.11696	-0.4419	1

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan tabel 8 di atas, diperoleh hasil bahwa seluruh nilai korelasi antarvariabel independen dalam penelitian ini lebih kecil dari 0,95. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 9
Estimasi Model *Common Effect*

Dependent Variable: IPM
Method Panel Least Squares
Date: 06/05/14 Time: 15:44
Sample: 2008 2012
Periods included: 5
Cross-sections included: 14
Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MND	1.193063	0.176959	6.742018	0.0000
EFT	0.045354	0.041454	1.094065	0.2779
EFS	-0.004486	0.046083	-0.097348	0.9227
C	61.23488	7.538112	8.123371	0.0000
R-squared	0.417960	Mean dependent var		71.60300
Adjusted R-squared	0.391504	S.D. dependent var		2.968626
S.E. of regression	2.315711	Akaike info criterion		4.572756
Sum squared resid	353.9263	Schwarz criterion		4.701242
Log likelihood	-156.0465	F-statistic		15.79810
Durbin-Watson stat	0.963389	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : hasil olah data

4. Hasil Uji Autokorelasi.

Pada tabel Durbin Watson dengan n (jumlah observasi) = 70, k (jumlah variable) = 4 dengan α 5%, diperoleh nilai dL dan dU yaitu nilai $dL = 1.494$ dan $dU = 1.735$.

Berdasarkan tabel 9 (estimasi model *common effect*) di bawah, nilai d (Durbin Watson) hitung pada penelitian ini diperoleh sebesar 0.963389. Dari nilai d hitung ini diperoleh nilai $(4 - d) = 3,036611$. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini terdapat masalah autokorelasi positif, di mana d (Durbin Watson) hitung $< dL$ ($0.963389 < 1.494$).

Untuk mengatasi masalah autokorelasi ini maka perlu dilakukan *treatment* data dengan mengubah *coefficient variance method* menjadi *white period* sehingga data yang diolah menjadi *white period standard error covariance (d.f.corrected)*. Dengan hal ini, masalah

pemilihan model. Berikut hasil pengujian dalam beberapa tahapan tersebut :

Pertama, hasil estimasi *Fixed Effect* sebagaimana tampak pada tabel 10 di bawah.

Kedua, hasil uji Chow sebagaimana tampak pada dari tabel 11 berikut :

Tabel 11
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.995258	(13,53)	0.0002
Cross-section Chi-square	47.815682	13	0.0000

Sumber : hasil olah data

Dari tabel 11 di atas diperoleh nilai *Prob Cross Section F* dan *Chi Square* adalah masing-masing 0.0002 dan 0.0000 yang lebih kecil dari α 0,05, sehingga kita menolak hipotesis nol

Tabel 10
Estimasi Model *Fixed Effect*

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 06/05/14 Time: 15:44
Sample: 2008 2012
Periods included: 5
Cross-sections included: 14
Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MND	0.784571	0.352769	2.224035	0.0304
EFT	0.014709	0.023014	0.639128	0.5255
EFS	-0.045551	0.046658	-0.976269	0.3334
C	70.56039	5.849713	12.06220	0.0000
R-squared	0.706036	Mean dependent var		71.60300
Adjusted R-squared	0.617292	S.D. dependent var		2.968626
S.E. of regression	1.836493	Akaike info criterion		4.261104
Sum squared resid	178.7534	Schwarz criterion		4.807167
Log likelihood	-132.1386	F-statistic		7.955881
Durbin-Watson stat	1.652153	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : hasil olah data

autokorelasi menjadi terkoreksi.

3.2 Hasil Pengujian Pemilihan Model

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pada analisis regresi data panel terdapat beberapa langkah dalam pengujian

(H_0 ditolak). Maka, untuk uji Chow, model yang terbaik (pemilihan) adalah model dengan metode *Fixed Effect*.

Ketiga, hasil estimasi *Random Effect* sebagaimana tampak pada tabel 12 di bawah.

Keempat, hasil uji Hausman sebagaimana tampak pada dari tabel 13 berikut :

Tabel 13
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	3	1

Sumber : hasil olah data

Dari tabel 13 di atas, diperoleh nilai *Prob Cross Section Random* adalah 1 yang lebih besar dari alpha (0,05), sehingga kita menerima hipotesis nol (H_0 diterima). Maka, untuk uji Hausman, model yang terbaik (pemilihan) adalah model dengan metode *Random Effect*.

Setelah melalui pengujian asumsi normalitas dan asumsi klasik serta pemilihan model, maka dapat diperoleh estimasi persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$IPM_{it} = 67.06510 + 0.977358MND_{it} + 0.026558EFT_{it} - 0.032590EFS_{it}$$

Prob. $0.0004 < 0,05$. Nilai koefisien variabel sebesar 0.977358, di mana tanda positif (+) menandakan adanya hubungan positif, yang berarti jika tingkat kemandirian keuangan daerah naik sebesar 1 persen, maka tingkat kesejahteraan rakyat (IPM) akan naik sebesar 0.977358 persen.

- b. Efektifitas keuangan daerah (EFT) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat (IPM), dengan nilai Prob. $0.3078 > 0,05$. Nilai koefisien variabel sebesar 0.026558, di mana tanda positif (+) menandakan adanya hubungan positif, yang berarti jika tingkat efektifitas keuangan daerah naik sebesar 1 persen, maka tingkat kesejahteraan rakyat (IPM) akan naik sebesar 0.026558 persen.
- c. Efisiensi keuangan daerah (EFS) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat (IPM), dengan nilai Prob. $0.4952 > 0,05$. Nilai koefisien variabel sebesar -0.032590, di mana tanda minus (-) menandakan adanya hubungan negatif, yang berarti jika tingkat efisiensi keuangan

Tabel 12
Estimasi Model *Random Effect*

Dependent Variable: IPM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/05/14 Time: 16:31
Sample: 2008 2012
Periods included: 5
Cross-sections included: 14
Total panel (balanced) observations: 70
Swamy and Arora estimator of component variances
White period standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MND	0.977358	0.260045	3.758419	0.0004
EFT	0.026558	0.025838	1.027865	0.3078
EFS	-0.032590	0.047511	-0.685941	0.4952
C	67.06510	6.770995	9.904764	0.0000
R-squared	0.295437	Mean dependent var		36.24430
Adjusted R-squared	0.263412	S.D. dependent var		2.169620
S.E. of regression	1.862070	Sum squared resid		228.8422
F-statistic	9.225043	Durbin-Watson stat		1.345732
Prob(F-statistic)	0.000035			

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan persamaan regresi data panel di atas, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemandirian keuangan daerah (MND) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat (IPM), dengan nilai

daerah turun sebesar 1 persen, maka tingkat kesejahteraan rakyat (IPM) akan naik sebesar 0.026558 persen.

3.3 Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Statistik F (Secara Simultan).

Berdasarkan tabel 12 (estimasi model *random effect*) di atas, diperoleh nilai *Prob (F-statistic)* sebesar 0.000035 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas (MND, EFT, dan EFS) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat (IPM). Dengan pembuktian ini, maka **H₁ penelitian ini diterima.**

2. Uji Statistik t (Secara Parsial).

Berdasarkan tabel 12 (estimasi model *random effect*), diperoleh nilai *Prob (t-statistic)* masing-masing variabel bebas yaitu MND, EFT dan EFS sebesar 0.0004 (< 0,05), 0.3078 (> 0,05) dan 0.4952 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial :

- a. Variabel kemandirian keuangan daerah (MND) berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan rakyat (IPM). Nilai koefisien variabel dengan tanda positif (+) menandakan adanya hubungan positif. Dengan pembuktian ini, maka **H₂ penelitian ini diterima.**
- b. Variabel efektifitas keuangan daerah (EFT) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan rakyat (IPM). Nilai koefisien variabel dengan tanda positif (+) menandakan adanya hubungan positif. Dengan pembuktian ini, maka **H₃ penelitian ini tidak diterima.**
- c. Variabel efisiensi keuangan daerah (EFS) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan rakyat (IPM). Nilai koefisien variabel dengan tanda negatif (-) menandakan adanya hubungan negatif. Dengan pembuktian ini, maka **H₄ penelitian ini diterima.**

3.4 Pembahasan

1. Kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dengan arah hubungan positif. Hubungan yang positif berarti bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyat. Ini berarti bahwa dengan semakin tinggi rasio PAD terhadap total penerimaan Dana Perimbangan maka kondisi ini akan semakin mendorong

terciptanya kesejahteraan rakyat. Tentu hal ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pencapaian PAD agar dapat terus meningkat, mengingat pengaruhnya yang positif dan signifikan terhadap bagi pencapaian kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Decta (2013) yang menemukan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Jawa Timur.

Berdasarkan data statistik yang tersedia, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2008-2012 sebagaimana dapat terlihat pada tabel 14 berikut :

Tabel 14
Tingkat Kemandirian Keuangan
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
TA 2008-2012

Tahun	PAD (Jutaan Rp)	Dana Perimbangan (Jutaan Rp)	Rasio (%)
2008	276.109	5.520.123	5,00
2009	268.953	5.480.899	4,91
2010	258.595	5.593.548	4,62
2011	305.233	6.263.783	4,87
2012	402.703	7.331.431	5,49
Rata-rata	302.319	6.037.957	5,01

Dari tabel 14 di atas, dapat dinyatakan bahwa secara agregat tingkat kemandirian keuangan daerah dalam konteks pola hubungan desentralisasi pemerintah pusat dan daerah berada pada pola tata hubungan instruktif, di mana pada pola ini pengarahannya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat daripada kemandirian pemerintah daerah. Artinya dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah masih sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dewa (2010) berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. bahwa berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum ditemukan evaluasi kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang.

Juga berdasarkan tabel 14 di atas, dapat diketahui pula bahwa pada periode tahun anggaran 2008-2012, persentase tingkat kemandirian atau ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat mengalami fluktuatif dan bahkan meningkat tajam di akhir periode penelitian (2012). Hal ini terjadi karena terus meningkatnya kebutuhan fiskal daerah di setiap tahunnya. Tentu kondisi ini haruslah didukung oleh upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Dalam hal pencapaian PAD, meskipun terjadi peningkatan kinerja PAD khususnya pada periode 2010-2012, tetapi kondisi ini masih diikuti dengan peningkatan perolehan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Sehingga yang terjadi adalah ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Idelanya adalah PAD menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer (dana perimbangan) dari pemerintah pusat hanyalah sebagai sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan.

Penerapan kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah. Kemandirian daerah akan sangat bergantung dari besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Aspek penting lainnya yang juga tidak dapat dikesampingkan adalah adanya dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai penggerak roda pembangunan.

Ditinjau dari sisi konsep desentralisasi fiskal, kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran pemerintah daerah dalam memaknai konsep desentralisasi fiskal, yaitu bahwa inti dari desentralisasi adalah kemandirian daerah, masih harus terus ditingkatkan. Ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pusat pada awal desentralisasi dapat dimaklumi, namun perubahan ke arah kemandirian harus terus dilakukan agar desentralisasi dapat mencapai tujuan akhirnya yaitu kesejahteraan rakyat, di mana secara empiris dari penelitian ini terbukti bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.

2. Efektifitas keuangan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dengan

arah hubungan positif. Hubungan yang positif berarti bahwa semakin tinggi tingkat efektifitas keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyat. Ini berarti bahwa dengan semakin tinggi rasio realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan (transfer) dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap target pendapatan daerah maka kondisi ini akan semakin mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah dkk (2012) yang menemukan bahwa peningkatan realisasi pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja ekonomi daerah yang berujung pada kesejahteraan rakyat.

Pengaruh positif ini pada dasarnya disebabkan oleh realisasi pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan lebih banyak bersumber dari dana perimbangan (transfer), sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pendapatan daerah yang terbesar bersumber dari dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui pola hubungan instruktif. Pembuktian ini sesuai dengan legitimasi Keynes dengan rumusan $Y = C + I + G + X - M$, yang dapat dijabarkan menjadi $Y = C (Y \cdot T + Tr) + I + G + X - M$ yang berarti bahwa pendapatan transfer (Tr) yang bersumber dari dana perimbangan dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana penyesuaian dan bagi hasil pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dianalogikan sebagai Y (PDB/Produk Domestik Bruto), di mana pertumbuhan ekonomi sendiri sebagai indikator kesejahteraan rakyat (Andros, 2006).

Berdasarkan data statistik, rata-rata tingkat efektifitas keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2008-2012 sebagaimana dapat terlihat pada tabel 15 berikut :

Tabel 15
Tingkat Efektifitas Keuangan Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
TA 2008-2012

Tahun	Realisasi Pendapatan (Jutaan Rp)	Target Pendapatan (Jutaan Rp)	Rasio (%)
2008	6,382,108	6,161,546	103.58
2009	6,469,930	6,723,443	96.23
2010	7,202,509	6,605,520	109.04
2011	8,739,549	7,676,533	113.85
2012	9,116,666	8,738,841	104.32
Rata-rata	7,582,152.40	7,181,176.60	105.58

Dari tabel 15 di atas, dapat dinyatakan bahwa secara agregat tingkat efektifitas keuangan daerah telah berada pada posisi yang sangat baik, yaitu dengan tingkat efektifitas keuangan yang sangat efektif. Artinya realisasi pendapatan melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hanya pada tahun 2009 saja target tidak terpenuhi. Hal ini adalah sebuah keberhasilan dan modal besar menuju tercapainya kemandirian keuangan yang masih belum optimal sebagaimana penjelasan sebelumnya. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Dewa (2010) yang melakukan penelitian berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007, dengan pembuktian efektifitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

Adapun pengaruh yang tidak signifikan adalah disebabkan karena masih belum optimalnya perolehan pendapatan PAD yang diperoleh dari sumber-sumber di luar retribusi dan pajak daerah yang memang sudah relative baik (bersifat reguler dan lebih massif), seperti : hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya yang sah. Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain, bagian laba, deviden. Sedangkan untuk sumber PAD lainnya yang sah dapat berupa : hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah) dan lain-lain.

3. Efisiensi keuangan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dengan arah hubungan negatif.

Hubungan yang negatif berarti bahwa semakin rendah tingkat efisiensi keuangan

daerah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan rakyat. Ini berarti bahwa dengan semakin rendah rasio belanja atau pengeluaran daerah terhadap pendapatan maka kondisi ini akan semakin mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Begitu pula sebaliknya, jika rasio belanja atau pengeluaran daerah terhadap pendapatan semakin tinggi, maka kondisi ini justru tidak mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Hal ini sudah sesuai dengan teori dan kriteria efisiensi bahwa semakin tinggi rasio belanja atau pengeluaran terhadap pendapatan justru mengakibatkan keuangan daerah semakin tidak efisien. Keuangan daerah yang tidak efisien menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat. Rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi (lihat tabel 6).

Berdasarkan statistik rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2008-2012 sebagaimana dapat terlihat pada tabel 14 berikut :

Tabel 16
Tingkat Efisiensi Keuangan Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
TA 2008-2012

Tahun	Realisasi Pengeluaran (Jutaan Rp)	Realisasi Pendapatan (Jutaan Rp)	Rasio (%)
2008	6,598,611	6,382,108	103.39
2009	6,742,084	6,469,930	104.21
2010	6,639,883	7,202,509	92.19
2011	8,314,088	8,739,549	95.13
2012	8,679,445	9,116,666	95.20
Rata-rata	7,394,822	7,582,152	97.53

Dari tabel 16 di atas, dapat dinyatakan bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah berada pada posisi tidak optimal. Tingkat efisiensi keuangan daerah berada pada kriteria kurang efisien (90-100%). Artinya penggunaan keuangan daerah yang kurang efisien (dengan angka rasio yang tinggi) yang disebabkan karena jumlah realisasi pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan, mengakibatkan terjadinya pemborosan untuk belanja daerah yang sebagian besar tidak dialokasikan pada sektor-sektor pembangunan dan belanja modal seperti belanja pegawai dan operasional.

Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003, penyusunan APBD menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran yang mengikuti pendekatan *New Public Management* yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan kebijakan.

Penggunaan paradigma *New Public Management* menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetensi tender (Hanafi dan Nugroho, 2009).

Secara teoritis, anggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran berbasis kinerja juga dapat dimengerti sebagai hasil penganggaran yang mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program dan diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan (BPKP, 2005 dalam Hanafi dan Nugroho, 2009).

Oleh karena itu, dengan pencapaian, ini pemerintah daerah sebaiknya melakukan evaluasi mendalam terkait dengan pencapaian kinerja keuangan yang kurang efisien dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dan amanat undang-undang.

Sedangkan pengaruh tidak signifikan disebabkan karena realisasi belanja daerah yang terbesar dialokasikan untuk belanja operasional yang di dalamnya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan bantuan sosial. Pengalokasian belanja daerah masih difokuskan pada belanja selain belanja modal yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan infrastruktur di berbagai sektor. Oleh karena itu dalam rangka memacu peningkatan kinerja ekonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih fokus dalam mengalokasikan anggaran untuk pos belanja modal. Belanja modal merupakan jenis belanja yang menghasilkan nilai tambah aset baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan pada periode tertentu. Dengan adanya kewenangan daerah dalam mengelola keuangan dari sisi belanja, maka masing-masing daerah mempunyai prioritas pembangunan yang berbeda sehingga alokasi belanja pun berbeda.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian statistik, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan daerah ditemukan sebagai berikut :
 - a. Tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada pola tata hubungan instruktif, di mana pada pola ini pengarahan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat daripada kemandirian pemerintah daerah;
 - b. Tingkat efektifitas keuangan daerah berada pada posisi yang sangat efektif;
 - c. Tingkat efisiensi keuangan daerah berada posisi yang kurang efisien.
2. Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan rakyat ditemukan sebagai berikut :
 - a. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dengan arah hubungan positif. Hubungan yang positif berarti bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyat;
 - b. Efektifitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dengan arah hubungan positif. Hubungan yang positif berarti bahwa semakin tinggi tingkat efektifitas keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyat;
 - c. Efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dengan arah hubungan negatif. Hubungan yang negatif berarti bahwa dengan semakin rendah rasio belanja atau pengeluaran daerah terhadap pendapatan maka kondisi ini akan semakin mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Begitu pula sebaliknya, jika rasio belanja atau pengeluaran daerah terhadap pendapatan semakin tinggi, maka kondisi ini justru tidak mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat.

5. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan pada kesempatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten/kota sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran dalam memaknai

konsep desentralisasi fiskal yaitu dengan berupaya meningkatkan kemandirian dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan;

2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan;
3. Penambahan variabel baru sebagai variabel independen maupun variabel dependen sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu;
4. Penulis merekomendasikan Analisis Sensitivitas untuk penelitian serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Amaliah, Vita. 2013. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. Skripsi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
- Ardhini dkk. _____. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)*. _____
- Budiman, Arif. 1992. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Dewa dkk. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*. Jurnal Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010
- DJPK. 2011. *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fajar, Mochamad. 2013. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah : Jurusan
- Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Ghazali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4*. Penerbit BPFE: Yogyakarta
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Ketiga*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gujarati, Damodar, N. 2003. *Basic Econometrics, International Edition*. _____
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1: 53-64
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Salemba Empat Jakarta
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Hanafi, Mamduh M. 2004. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE
- Hasugian, Andros. 2006. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. _____
- Kusreni dkk. 2009. *Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Universitas Hasanuddin
- Manurung, Jonni J., Manurung, Adler H., Saragih, Ferdinand D. 2005. *Ekonometrika. Cetakan*

Pertama. Penerbit Elex Media Computindo. Jakarta.

Mariani, Lidia. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)*. Artikel Ilmiah : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Melianta, Anggi. 2010. *Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnyaterhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya)*. Skripsi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung

Nurhaidah. 2006. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bima*. Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang

Pitron, Decta. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah : Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Rai, I.G. Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Ratna. 2011. *Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2000-2009*. Skripsi : Universitas Sebelas Maret Surakarta

Sawir, Agnes. 2001. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Simanjuntak, Payaman J. 2000. *Produktivitas tenaga Kerja*. Jakarta: Grafindo

Sunandar. 2012. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (UPKBKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan*

Panggung Kota Tegal. _____.
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama

Sularso, Havid & Restianto, Yanuar (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi, Vol 1, No 2

Suradi. 2006. *Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI

Todaro. M.P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga

Usman. 2011. *Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo*. _____

Widiastuti, Komang. 2011. *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. _____

Winarno, Wing Wahyu. 2007. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews*. UPP STIM YPKN Yogyakarta

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Yuliani, Indah. 2013. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Pangkep*. Jurnal : Universitas Hasanuddin Makassar